

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga  
Melaksanakan Internal Audit  
*Febrina Nafasati*

*Earnings Management* : Teori dan Penerapan  
*Dian Indriana T*

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada  
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
*Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S*

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan  
*Mobile Banking* pada Perusahaan Perbankan di Indonesia  
*Umi Pratiwi, Muhammad Nur*

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan  
*Nunik Kusnilawati*

*Forensic Audit dan Fraud Audit*  
*Febrina Nafasati*

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)  
*Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto*

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha  
*Andy Kridasusila*

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis  
*Dian Triyani*

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi  
Resiko Bisnis Global  
*Ardiani Ika S*

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga  
Melaksanakan Internal Audit  
*Febrina Nafasati*

*Earnings Management* : Teori dan Penerapan  
*Dian Indriana T*

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada  
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
*Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S*

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan  
*Mobile Banking* pada Perusahaan Perbankan di Indonesia  
*Umi Pratiwi, Muhammad Nur*

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan  
*Nunik Kusnilawati*

*Forensic Audit* dan *Fraud Audit*  
*Febrina Nafasati*

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)  
*Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto*

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha  
*Andy Kridasusila*

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis  
*Dian Triyani*

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi  
Resiko Bisnis Global  
*Ardiani Ika S*

## SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis  
Terbitan 3 bulan sekali  
(Januari, April, Juli, Oktober)

Penerbit :  
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pelindung :  
Rektor Universitas Semarang

Penanggungjawab :  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Dewan redaksi :  
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)  
Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)  
Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)  
Prof. Dr. Dra. Sulastri ME. M.kom (UNISRI)  
Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)

Redaktur Pelaksana :  
Andy Kridasusila SE MM  
Ardiani Ika S., SE MM Akt  
Adijati Utaminingsih SE MM

Sekretaris Redaksi :  
Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt

Tata Usaha :  
Ali Arifin

Alamat Penerbit/Redaksi :  
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)  
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272  
SEMARANG – 50196

Terbit Pertama kali : Juli 2002

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

## SOLUSI

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

ISSN : 1412-5331

### DAFTAR ISI

1. Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga Melaksanakan Internal Audit ..... <i>Febrina Nafasati</i>	1 - 8
2. <i>Earnings Management</i> : Teori dan Penerapan ..... <i>Dian Indriana T</i>	9 - 20
3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ..... <i>Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S</i>	21 - 35
4. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>Mobile Banking</i> pada Perusahaan Perbankan di Indonesia ..... <i>Umi Pratiwi, Muhammad Nur</i>	37 - 48
5. Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan ..... <i>Nunik Kusnilawati</i>	49 - 55
6. <i>Forensic Audit dan Fraud Audit</i> ..... <i>Febrina Nafasati</i>	57 - 64
7. Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng) ..... <i>Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto</i>	65 - 73
8. Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha ..... <i>Andy Kridasusila</i>	75 - 79
9. Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis ..... <i>Dian Triyani</i>	81 - 86
10. Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi Resiko Bisnis Global ..... <i>Ardiani Ika S</i>	87 - 92

**Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam  
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)**

Oleh :  
**Dijan Rahajuni  
Endang Sri Gunawati  
Suprpto**

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Soedirman Purwokerto**

**Abstract**

Study about " The Impact of District Development Programs (Program Pengembangan Kecamatan) To Ease the Poverty in Banyumas Region". The Aim of this research are to determine and analyze the performance of District Development Programs, the influence of District Development Programs toward income per capita, and the influence of District Development Programs to ease and increase prosperity, study case in Kedungbanteng, Banyumas.

The Data include primary data that got from 4 groups in each village with the amount 128 people as sample of group member in Kedungbanteng district, and the village consist of Kedungbanteng village, Karangnangka and Melung. The Period of research is on July 2009. The analysis method that use are with the proportion, tabulation, and comparation each variables.

The result of this research are :

1. The performance of District Development Programs ( PPK = Program Pengembangan Kecamatan) in the term of the influences in Kedungbanteng area in the capital availability point of view is significant enough with the average 47,17 percent and the targeting point is 60,70%.
2. The contribution income activity of SPP (woman lending money) from PPK is 48,82 % toward income per capita including significant enough.
3. All of responden that got the impact from PPK is above from poverty line, and for the using of business activity in 3,73 times from KFM but for the using of lending money not for business activity is 2,54 times from KFM.
4. The level of respondent income that proper in KHL only got the benefit that using lending money activity of business activity from Kedungbanteng area.

Therefore it is suggested that the lending of money was so needed and proper to continue, but it must be more selected with direct cross check the availability of business activity each member and needed empower with good quality of member of PPK to determine the business prospect and good management.

*Keywords:* Program Pengembangan Kecamatan, kemiskinan, simpan pinjam perempuan, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan hidup layak.

**Pendahuluan**

Rencana pemerintah Indonesia melalui *Millennium Development Goals* ( MDGs) dalam pembangunan ekonomi adalah menargetkan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan 7,5 persen pada tahun 2015 (PNPM, 2007), oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan perlu mendapat perhatian. Perhatian dalam hal ini dapat berupa evaluasi atas pelaksanaan dan dampak dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian nantinya dapat diketahui tingkat keberhasilan dan ataupun kekurangan dari program-program tersebut.

Sebenarnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia dan mencapai target MDGs pemerintah sudah berupaya melalui berbagai program baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya program tersebut benar-benar langsung untuk menanggulangi kemiskinan

seperti bantuan langsung tunai dan secara tidak langsung yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan seperti meningkatkan pendapatan melalui perluasan usaha dan kesempatan kerja, bantuan permodalan dan usaha meningkatkan produktivitas penduduk miskin. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Di Kabupaten Banyumas masalah kemiskinan adalah merupakan masalah yang sangat perlu mendapat perhatian, karena ternyata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas angka persentasenya melebihi angka hasil survey dari SUSENAS seperti pada tahun 2007 penduduk miskin di Banyumas 38 persen dan hasil susenas 14,49 persen di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.
2. Seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
3. Seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
4. Seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
4. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Dalam panduan Kemiskinan dan Penanggulangannya, 2003 didefinisikan bahwa kemiskinan adalah situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap mustahil. Salah satu ukuran untuk menandai apakah seseorang dikategorikan miskin atau tidak menurut BPS dari hasil sensus ekonomi 2006 lanjutan 2007 kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan (*poverty line*) yaitu dengan pendapatan perkapita perbulan dengan total pengeluaran perbulan sebesar Rp 131.256,00 untuk pedesaan dan Rp 175.324,00 untuk daerah perkotaan.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan sosial lainnya, untuk mengukur tingkat kesejahteraan minimum digunakan pendapatan setara dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja daerah yang bersangkutan. Di Kabupaten Banyumas pendapatan sesuai KHL pada bulan Mei tahun 2009 Rp 719.022,57.

Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah :

1. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 adalah memajukan kesejahteraan umum.
2. Sebagai konsekwensi dari perwujudan tujuan negara tersebut adalah membantu penduduk untuk dapat keluar dari kemiskinan.
3. Kemiskinan adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat karena berbagai keterbatasan yang ada pada kelompok masyarakat miskin.

4. Pembangunan adalah merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat kehidupan yang bersifat multidimensional.
5. Program Pengembangan Kecamatan adalah merupakan salah satu program yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, dan penyediaan sarana prasarana sosial pendukung kegiatan ekonomi produktif dan bantuan permodalan untuk kegiatan ekonomi produktif bagi kelompok ekonomi miskin.
6. Keberhasilan program PPK dapat ditunjukkan melalui pengurangan jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Program Pengembangan Kecamatan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

### Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan survey dengan cara pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Sampel lokasi diambil lokasi kecamatan adalah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
2. Sampel desa 3 desa-desa di kecamatan Kedungbanteng yaitu desa yang terdekat dengan ibu kota kecamatan dalam hal ini desa Kedungbanteng, desa yang jaraknya menengah dengan ibu kota kecamatan yaitu desa Karangangka dan desa dengan jarak terjauh dari ibu kota kecamatan yaitu desa Melung.
3. Sampel sasaran adalah kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan yang untuk masing-masing desa diambil 4 kelompok, hal ini karena jumlah kelompok yang paling sedikit di ketiga desa-desa tersebut adalah 4 ( empat ).
4. Responden adalah anggota kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan dengan jumlah responden sebanyak 128 orang.

Untuk mencapai tujuan penelitian maka alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, akan dianalisis dengan melihat perbandingan antara jumlah peminjam yang menggunakan dana pinjaman Program Pengembangan Kecamatan untuk Kegiatan ekonomi produktif dan tidak. Dengan formula :

$$X = \frac{Rep}{R} \times 100$$

Dimana :

X = prosentase responden yang menggunakan dana PPK untuk Kegiatan ekonomi Produktif

$R_{ep}$  = jumlah responden yang menggunakan dana PPK untuk Kegiatan ekonomi Produktif

R = jumlah semua responden

Apabila hasil X ( Showam dalam Lulu 2006 ) :

- 1). Lebih besar 33,33 % maka pelaksanaannya baik.
- 2). Sama dengan 33,33 % maka pelaksanaannya cukup baik
- 3). Kurang dai 33,33% maka pelaksanaannya kurang baik

Untuk mengetahui peranan modal pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota, digunakan formula :

$$X = ( M_{ppk} / M ) \times 100$$

Dimana :

X = prosentase jumlah modal usaha yang berasal dari pinjaman PPK untuk kegiatan ekonomi produktif

$M_{ppk}$  = jumlah responden yang menggunakan dana pinjaman PPK untuk kegiatan ekonomi produktif



M = jumlah modal usaha semua responden

Apabila hasil X ( Showam dalam Lulu 2006 ) :

- 1). Lebih besar 33,33 % maka peranannya baik.
- 2). Sama dengan 33,33 % maka peranannya cukup baik
- 3). Kurang dai 33,33% maka peranannya kurang baik

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga penerima manfaat PPK di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$X_y = (Y_{ep} / Y) \times 100$$

Dimana :

$X_y$  = prosentase pendapatan dari PPK

$Y_{ep}$  = pendapatan dari usaha ekonomi produktif

$Y$  = total pendapatan keluarga

Dengan menggunakan kriteria dari Showam dalam Lulu 2006 maka apabila hasilnya :

1. > 33,33 % maka peranannya kecil
2. = 33,33% maka peranannya sedang
3. < 33,33% maka peranannya besar

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, dianalisis dengan membandingkan pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat PPK baik yang melakukan kegiatan usaha dan yang tidak melakukan kegiatan usaha, dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan survay sosial ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar Rp 131.256,00 untuk daaerah pedesaan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat PPK di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, akan dianalisa dengan membandingkan pendapatan yang diterima penerima manfaat PPK baik yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha, dengan pendapatan setara kebutuhan hidup layak Kabupaten Banyumas pada bulan Mei tahun 2009 yaitu sebesar Rp 719.022,25.

## Hasil dan Pembahasan

### Peranan PPK terhadap Kegiatan Usaha Anggota

Dilihat dari persentase peranan modal PPK terhadap modal usaha anggota besarnya lebih dari 33,33 persen maka secara keseluruhan peranan PPK dapat dikatakan cukup besar dalam menambah permodalan anggota yaitu secara keseluruhan rata-rata sebesar 47,17 persen, dengan kategori sebagai berikut :

- 1). Untuk desa Kedungbanteng peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam kategori sedang yaitu sebesar 39,29 persen.
- 2). Untuk desa Karangnangka peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam ketegori sedang yaitu sebesar 58,22 persen, dan
- 3). Untuk desa Melung peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam kategori tinggi yaitu sebesar 63,24 persen dari modal usaha anggota.

Apabila dilihat dari jumlah pinjaman yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha maka desa Kedungbanteng untuk tiap respondenya rata-rata menerima paling besar dibandingkan dengan desa Karangnangka dan Melung. Atau dapat dikatakan untuk desa dekat dengan ibu kota kecamatan menerima pinjaman terbesar, kemudian besar kedua adalah desa yang jaraknya menengah dari ibu kota kecamatan dan untuk desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan menerima pinjaman terkecil. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Kedungbanteng rata-rata, besarnya pinjaman

2,275 juta rupiah, Karangnangka rata-rata besarnya pinjaman 1,367 juta rupiah dan Melung rata-rata besarnya pinjaman adalah 1,32 juta rupiah.

Melihat kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peranan pinjaman PPK masih sangat dibutuhkan untuk menambah modal usaha anggota kelompok peminjam. Kemudian melihat kelompok peminjam yang paling besar membutuhkan adalah mereka yang berada/bertempat tinggal jauh dari ibu kota kecamatan atau masyarakat pedesaan. Untuk itu semestinya perlu diberikan upaya untuk lebih membantu permodalan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari ibu kota kecamatan dan membutuhkan bantuan modal untuk usaha. Hal ini dapat dipahami karena untuk desa yang jauh dengan ibu kota kecamatan akses masyarakat terhadap sumber dana (perbankan) sangat jauh dan walaupun dapat harus memerlukan ongkos/ biaya yang antara lain untuk transportasi ke perbankan.

### **Sumbangan Pendapatan Usaha Anggota PPK terhadap Pendapatan Keluarga**

Dari seluruh responden anggota PPK yang diteliti hanya 90 orang atau 70,33 persen yang menggunakan pinjaman PPK untuk menambah modal usaha. Sisanya digunakan untuk alasan menambah konsumsi sebanyak 14,07 persen dan hanya dipinjam namanya saja dalam arti uang pinjamannya digunakan oleh pihak lain sebanyak 15,62 persen.

Secara keseluruhan pendapatan usaha dari anggota kelompok PPK yang melakukan kegiatan usaha dalam hal ini adalah kaum wanita memberikan peranan terhadap pendapatan keluarga yang cukup besar, yaitu sebesar 48,82 persen, suami berperan memberikan sumbangan terhadap pendapatan keluarga sebesar 46,06 persen dan pendapatan lain-lain yang berasal dari sumbangan anak yang sudah bekerja dan ataupun dari hasil sampingan sebesar 5,12 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kaum wanita (ibu rumah tangga) apabila mau melakukan kegiatan usaha dapat saja pendapatannya justru lebih besar dari pada kaum laki-laki (bapak).

Kemudian apabila dilihat per desa sampel maka kondisinya adalah sebagai berikut :

1. Desa Kedungbanteng, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 59,29 persen atau 24,32 persen lebih tinggi dari peranan laki-laki dalam menyumbang pendapatan pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 34,97 persen.
2. Desa Karangnangka, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga adalah sebesar 38,86 persen atau laki-laki lebih tinggi peranannya dalam menyumbang pendapatan pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 55,81 persen, jadi besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap pendapatan keluarga lebih tinggi 16,95 persen secara rata-rata.
3. Desa Melung, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 40,48 persen atau 16,13 persen lebih tinggi peranan laki-laki dalam menyumbang pendapatan pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 56,61 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada desa yang terdekat dengan ibu kota kecamatan peranan pendapatan kaum wanita terhadap pendapatan keluarga lebih besar dari kaum laki-laki, sedangkan untuk desa yang jaraknya menengah dari ibu kota kecamatan dan desa terjauh peranan pendapatan wanita terhadap pendapatan keluarga adalah lebih rendah. Namun demikian secara keseluruhan peranan pendapatan wanita terhadap pendapatan keluarga adalah besar/tinggi yaitu sebesar 48,82 persen dan laki-laki 46,06 persen.

### **Peranan Pendapatan Wanita Responden terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan**

Pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan hidup Kecamatan Kedungbanteng

Di Kecamatan Kedungbanteng kondisinya adalah sebagai berikut : besarnya pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2007 adalah sebesar RP 3.505.959,00

per tahun atau rata-rata perbulan adalah sebesar Rp 292.163,25. Hal ini berarti bahwa di Kecamatan Kedungbanteng masyarakat baru dapat memenuhi kebutuhan fisik minimal dan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, karena pendapatan perkapitanya baru mencapai 40,63 persen dari pendapatan hidup layak.

Dengan demikian maka apabila dibandingkan dengan kondisi pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas, kondisi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Kedungbanteng adalah berada di bawah rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas sebesar Rp 94.544,25. Untuk pemenuhan kebutuhan fisik minimalnya rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Banyumas mencapai 294,62 persen dari kebutuhan fisik minimal, sedangkan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng hanya mencapai 222,59 persen atau 72 persen dibawah rata-rata pencapaian masyarakat Kabupaten Banyumas.

Demikian juga dalam hal kemampuan pendapatan untuk dapat hidup layak, untuk tingkat Kabupaten Banyumas sebesar Rp 719.022,57 masyarakat Kabupaten Banyumas rata-rata baru mencapai 53,78 persen namun masyarakat Kecamatan Kedungbanteng hanya mampu mencapai 40,63 persen atau 13,15 persen di bawah rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng masih berada di bawah kondisi rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu sangat diperlukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan Program Pemberdayaan Kecamatan khususnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang dimaksudkan untuk dapat membantu usaha meningkatkan pendapatan keluarga.

#### Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan responden

Untuk melihat tingkat kemiskinan dan kesejahteraan responden dilihat dari besarnya pendapatan perkapita keluarga responden dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita yang ada di Kecamatan Kedungbanteng, baik untuk responden yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif maupun responden yang tidak mempunyai kegiatan ekonomi produktif.

##### a. Responden yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif

1. Desa Kedungbanteng rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 893.628,00; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Kedungbanteng berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (3,56 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas KFM (6,81 kali KFM) dan untuk KHL juga berada diatas KHL (1,24 kali KHL).
2. Desa Karangangka rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 315.029; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Karangangka berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (1,08 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas KFM (2,40 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,44 kali KHL).
3. Desa Melung rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 262.161; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Melung berada di bawah pendapatan perkapita kecamatan (0,90 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas KFM ( 1,99 kali KFM ) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,36 kali KHL).

Dengan dapat disimpulkan bahwa untuk desa Kedungbanteng kondisi ekonomi responden sudah baik namun untuk desa Karangangka dan desa Melung kondisinya masih belum baik karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak terutama desa Melung yang paling jauh letaknya

dari ibu kota kecamatan bahkan rata-rata pendapatan perkapita responden masih berada di bawah pendapatan perkapita kecamatan.

b. Responden yang tidak mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif

1. Desa Kedungbanteng rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 469.145,00; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Kedungbanteng berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (1,61 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas KFM ( 3,57 kali KFM ) dan untuk KHL juga berada diatas KHL (0,65 kali KHL).
2. Desa Karangnangka rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 264.516; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Karangnangka berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (0,91 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas KFM (2,02 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,37 kali KHL).
3. Desa Melung rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 276.835; rata-rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp 719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Melung berada di bawah pendapatan perkapita kecamatan 0,92 kali kecamatan ); kondisi kemiskinan berada diatas KFM (2,04 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,37 kali KHL).

Dengan dapat disimpulkan bahwa untuk desa Kedungbanteng kondisi ekonomi responden yang tidak menggunakan pinjaman PPK untuk kegiatan ekonomi produktif lebih baik dari desa yang lain meski belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dari pada desa Karangnangka dan desa Melung.

c. Perbandingan kemiskinan dan kesejahteraan responden antara yang menggunakan pinjaman SPP untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dengan responden yang memperoleh pinjaman SPP tidak untuk kegiatan usaha ekonomi produktif

Secara rata-rata pendapatan responden yang menggunakan pinjaman PPK untuk kegiatan usaha ekonomi produktif pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari pada yang tidak, kecuali untuk desa Melung, yaitu desa yang paling jauh dengan ibu kota kecamatan. Hal ini dapat terjadi karena responden memang merupakan orang yang sudah merasa mampu di kelompoknya sehingga secara relatif mereka lebih mampu dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain.

Kemudian apabila dilihat dari besarnya tingkat kemiskinan, yaitu dengan melihat prosentase pendapatan perkapita responden dengan garis kemiskinan maka kondisinya adalah sebagai berikut :

bahwa responden yang memiliki usaha ekonomi produktif rata-rata pendapatan perkapitanya dapat mencapai 3,73 kali kebutuhan fisik nminimal dan responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya dapat mencapai rata-rata 2,54 kali kebutuhan fisik minimal atau ada selisih rata-rata 1,19 kali kebutuhan fisik minimal. Pengecualian juga terjadi untuk desa Melung, dimana justru responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif rata-rata kemampuan pendapatan perkapitanya dalam mencukupi kebutuhan fisik minimal lebih tinggi 0,05 kali dari responden yang melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan responden dalam hal ini adalah kemampuan pendapatan perkapita dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, antara responden yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dan yang tidak maka kondisinya kemampuan rata-rata pendapatan perkapita responden yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup layak lebih tinggi dari pada responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif, yaitu sebesar 68 persen dari kebutuhan hidup layak sedangkan

responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya 46 persen saja atau ada selisih kemampuan sebesar 12 persen.

Namun demikian secara keseluruhan semua responden kemampuan pendapatan perkapitanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak masih belum dapat kecuali untuk desa Kedungbanteng dan itupun hanya responden yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 75 persen responden penerima pinjaman modal dari Program Pengembangan Kecamatan masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas usaha dan manajemen usaha yang baik agar tujuan dari Program Pengembangan Kecamatan benar-benar dapat tercapai sesuai dengan tujuannya yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kesimpulan dan Implikasi**

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Kedungbanteng di lihat dari :
  - a. Perannya untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha adalah cukup besar yaitu rata-rata sebesar 47,17 persen dari modal usaha anggota kelompok.
  - b. Ketepatan sasaran, sudah tepat sasaran karena 68,70 persen penerima manfaat menggunakan pinjaman untuk menambah modal usaha.
2. Sumbangan Pendapatan dari usaha yang dilakukan anggota kelompok simpan pinjam perempuan dari dana PPK adalah sebesar 48,82 persen terhadap pendapatan keluarga berarti dalam kategori yang besar. Sumbangan terbesar adalah dari desa Kedungbanteng 59,29 persen, Melung 40,48 persen dan Karangnangka 38,86 persen.
3. Semua responden penerima manfaat berada diatas garis kemiskinan, dan untuk penerima manfaat yang menggunakannya untuk usaha berada 3,73 kali KFM sedangkan untuk penerima manfaat pinjaman tidak untuk kegiatan usaha 2,54 kali KFM.
4. Tingkat pendapatan responden yang dapat memenuhi KHL hanya penerima manfaat yang menggunakan dana pinjaman untuk usaha dari desa Kedungbanteng. Untuk desa Karangnangka dan Melung baik penerima manfaat yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak belum dapat memenuhi pendapatan sesuai kebutuhan hidup layak.

Implikasi yang dapat diambil :

1. Mengingat peranan pinjaman PPK yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan modal anggota maka pemberian pinjaman perlu dilanjutkan tetapi dengan cara yang lebih selektif, misalnya dengan mengecek langsung keberadaan anggota dan usaha anggota.
2. Mengingat ternyata sumbangan kaum perempuan terhadap pendapatan keluarga cukup besar maka perlu diadakan peningkatan pengetahuan perempuan dan ketrampilan agar dalam melakukan usaha ekonomi produktifnya lebih berkualitas, misalnya dengan dilakukan pelatihan mencari peluang usaha, peluang pasar dan manajemen usaha kecil.
3. Perlu upaya lebih meningkatkan pendapatan lagi bagi responden khususnya dan masyarakat kecamatan lokasi umumnya mengingat pendapatan perkapita masih berada di bawah tingkat pendapatan perkapita kabupaten dan KHL juga belum dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan benar-benar memanfaatkan dana pinjaman yang diperoleh untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif.
4. Agar tujuan dari PPK benar-benar dapat tercapai diperlukan pemantauan dan penyuluhan-penyuluhan dari pengelola PPK dan ataupun pihak-pihak terkait secara berkesinambungan agar penerima manfaat benar-benar memanfaatkan dana yang diperoleh sesuai dengan tujuan PPK.

**Daftar Pustaka :**

- Bappeda, 2003. **Kemiskinan dan Penanggulangannya**. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Purwokerto.
- BPS, 2007. **Protret dan Prospek Ekonomi Indonesia**. Hasil Susenas, 2007.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2007. **Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri - P2KP 2007**. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo, 1997. **Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia**. Kanisius, Yogyakarta.
- Lulu Nurul, 2006. **Partisipasi Kerja Wanita Pedesaan dalam Industri Rumah Tangga, Studi Kasus pada Wanita Perajin Batik di Kecamatan Banyumas**. Skripsi FE - Unsoed, Purwokerto.
- Mudrajat Kuncoro, 2004. **Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah**. Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 1998. **Kembali ke Ekonomi Pancasila Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan**. Aditya Media, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 2002. **Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan**. LPFE - UI, Jakarta
- Sumodiningrat G, 1977, **Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat**. PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.